

Peran Epistemologi Ilmu Pengetahuan dalam Membangun Peradaban

Mudzakir*

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah
Email: ahmad_mudzakir@ymail.com

Abstract

The formation of a culture in a society, which is based only on one of the scientific dimensions, such as an idea that science is value-free, or that religion is merely a fata morgana, will result in incomplete culture, or even destroy the culture itself. It, on this matter, lies the responsibility of scientists together with other stakeholders to build the nation's culture. With their expertise, scientists should choose and determine a strategy to integrate moral dimension into scientific ontology, epistemology and axiology. Ontologically, Islam recognizes the existence and truth of āyāt al-kauniyyah as well as āyāt al-qauliyah and integrates the existence of the two based on faith. Furthermore, the development of the products of Islamic thoughts based on this philosophy form a paradigm system of metaphysical realism based on fundamental concept of tawhīd (oneness) of the existence of Allah s.w.t., minds and the universe (monism). In the oneness of existence (tawhīd), what is meant by science needs a consistent formula in light of the feature of existential oneness. The nature of science seen in this light tends to trigger another scientific activity, i.e. the procedure of finding and developing sciences in religion, within which Allah SWT as a focal point of the thinking framework as well as a reference to the whole existential structure.

Keywords: Epistemology, Knowledge, Character Building, Integration, Civilization.

Abstrak

Struktur sebuah kebudayaan di dalam suatu masyarakat, yang berdasarkan hanya pada salah satu dimensi keilmuan, contohnya seperti sebuah gagasan yang menyatakan bahwa sains atau pengetahuan itu bebas nilai, atau yang menyatakan bahwa agama itu hanyalah sebuah fatamorgana, akan menghasilkan kebudayaan yang tidak lengkap, bahkan bisa meruntuhkan kebudayaan itu sendiri. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab bersama para saintis dengan para pemilik kepentingan lainnya yang terkait untuk membangun budaya suatu bangsa. Dengan keahlian dan kemampuannya, para saintis

* Program Studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus, Jl. Conge Ngembal Rejo No.51, Kudus, Jawa Tengah 59322, Telp: (+62291) 432677.

atau ilmuwan seharusnya memilih dan merentukan sebuah strategi jitu untuk menyatukan dimensi moral atau akhlak ke dalam ontologi keilmuan, serta epistemologi dan aksiologinya. Secara ontologis, Islam mengakui dan menerima eksistensi dan kebenaran ayat al-kauniyyah sebagaimana halnya dengan mengakui dan menerima eksistensi dan kebenaran ayat al-qauliyyah dan menyatukan keduanya dalam bingkai keimanan. Lebih jauh lagi, pengembangan produk-produk pemikiran keislaman yang berbasis filsafat bisa membentuk sistem paradigma realisme metafisik yang berbasis konsep tauhid yang paling mendasar dari eksistensi (wujud) Allah SWT, pikiran-pikiran, dan alam semesta (monisme). Sifat dasar sains atau pengetahuan yang berbasis tauhid cenderung menggerakkan aktivitas keilmuan lainnya, dengan kata lain, ini menjadi prosedur untuk menemukan dan mengembangkan sains dalam agama, yang di dalamnya Allah SWT sebagai titik fokus kerangka berpikir sebagaimana halnya juga berfungsi sebagai acuan bagi seluruh struktur kewujudan.

Kata Kunci: Epistemologi, Pengetahuan, Pembangunan Karakter, Integrasi, Peradaban.

Pendahuluan

Mencermati fenomena kehidupan berbangsa di Indonesia melalui berbagai media sekarang ini cukup memprihatinkan, bahkan beberapa pengamat menengarai adanya arah menuju “negara gagal”. Berbagai krisis kemanusiaan yang sedang menimpa bangsa ini, mirip dengan situasi yang dihadapi oleh Socrates, Descartes, dan Immanuel Kant pada zamannya masing-masing. Integritas dan karakter kemanusiaan para filsuf tersebut menentang arus yang sedang menjadi kecenderungan masyarakat. Mereka dengan penuh risiko terus bekerja memperjuangkan dan mewujudkan kebenaran yang diyakininya.

Socrates yang hidup antara 470-399 SM di Athena, menghadapi dan menyaksikan keruntuhan Athena oleh kehancuran orang-orang oligarki. Di sekitarnya dasar-dasar peradaban lama remuk, kekuasaan jahat mengganti keadilan disertai munculnya penguasa-penguasa politik yang menjadi orang-orang sompong. Para pemuda Athena pada masa ini meyakini doktrin relativisme dari kaum Sofis, sedangkan Socrates seorang penganut moral absolut, meyakini bahwa menegakkan moral merupakan tugas filsuf, berdasarkan ide-ide rasional dan keahlian dalam pengetahuan.¹

Descartes (1596-1650 M) di Inggris menghadapi situasi keyakinan “mutlak” agama (Gereja) yang telah melenceng dari

¹ Ahmad Tafsir, *Filsafat Umum; Akal dan Hati sejak Thales sampai James*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992), 45.

pemikiran rasional, dengan jargonnya “*credo ut intellegam*”, menjadikan masyarakat takut mengemukakan pemikiran berbeda dari pendapat tokoh Gereja. Dia tampil dengan gagah berani melepaskan diri dari kerangkeng yang mengurung rasionalitas sikap dan pemikiran masyarakat.² Demikian pula Immanuel Kant (1724-1804 M) di Jerman menghadapi suatu krisis doktrin sosial yang menentukan eksistensi manusia dan kemanusiaan beserta produk akal-budi yang mestinya berimbang dan utuh.

Ketua Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, B Herry Priyono, menilai kemerosotan moral bangsa terjadi karena semua institusi yang menyangganya telah kehilangan alasan adanya (*raison d'être*). Akibatnya, misi dan tujuan berbagai institusi seperti lembaga kesehatan dan lembaga pendidikan tidak tercapai. Sekarang ini, institusi negara tidak lebih dari sarang lapangan kerja atau sarang pencarian duit.³

Sementara itu sosiolog Universitas Indonesia, Imam B. Prasodjo, mengungkapkan bahwa negeri ini sudah sarat dengan “koalisi satanik” yang sangat sistemik di semua lini kehidupan bangsa, baik di birokrasi pemerintahan maupun penegak hukum. Tidak mudah menghancurkan “koalisi satanik” ini, karena semua saling melindungi. Untuk mengatasinya, harus diimbangi dengan koalisi baru yang harus segera dibangun, yaitu koalisi kejujuran.⁴

Sebagai bangsa yang dikenal religius, seakan norma agama yang mengetengahkan moral-transcendental tidak hadir di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan moral-kemanusiaan juga hampir tidak memiliki pengaruh. Untuk itu, tulisan singkat ini mencoba menghadirkan proses substansi beragama yang pada prinsipnya membangun moral manusia (individu dan sosial) yang normanya datang dari Tuhan menjadi produk berupa ilmu pengetahuan yang menjustifikasi pola perilaku religiusitas yang sangat dihormati, dijunjung tinggi, dan ditaati oleh umat beragama.

Arti dan Sumber Moral

Berbagai media, baik cetak maupun elektronik, menyuguhkan berita kepada kita hampir setiap hari dengan seolah mengabarkan bahwa bangsa ini semakin tidak bermoral. Setiap hari

² *Ibid.*, 112.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

stasiun televisi nasional menampilkan berita tentang adanya mafia hukum, mafia pemilu, mafia anggaran. Di samping itu banyak berita investigasi yang menayangkan para pedagang jajanan dan makanan yang pembuatannya dicampur dengan borak, formalin, dan pewarna.⁵ Berita-berita itu ditambah dengan mahalnya pendidikan yang mesti ditanggung rakyat, korupsi yang menggurita, ketidakadilan sosial, politik, dan ekonomi.

Fakta empiris bisa kita saksikan, semakin banyaknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di setiap lembaga sosial dan pemerintahan, pelanggaran hukum dan aturan birokrasi, suap-menuap ketika ingin menjadi pegawai, ingin masuk sekolah, ingin menyelesaikan perkara di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, ingin mendapatkan proyek, merapikan laporan administrasi keuangan, dan masih banyak lagi. Saksi yang masih “bermoral” terhadap berbagai tindakan tersebut merasa bingung, bahkan takut, dan frustasi. Apa yang mesti mereka diperbuat? Berbagai ketimpangan yang dilakukan para pejabat penyelenggara negara dan sebagainya,⁶ juga ditambah moral rakyat yang rusak, menunjukkan seakan negara ini hampir runtuh, menuju negara gagal dan seterusnya.

Pemberitaan melalui media massa, ternyata sangat efektif mempersepsi sebagian masyarakat, bahkan menaruh pesimisme luar biasa kepada pemerintah dalam mengelola tugas dan kewajibannya. Seperti yang dideskripsikan oleh B. Susetyo, bagaimana rakyat Indonesia bisa mengakui keterlibatan moral dalam setiap pertarungan kepentingan politik, jika apa yang sedang disaksikannya adalah korupsi yang semakin melembaga,⁷ sistematis, dan dilakukan secara berjamaah. Saling menutupi terhadap tindakan perselingkuhan (dalam arti luas), penyalahgunaan wewenang, ketidakadilan dalam penyelesaian pelanggaran hukum dan peraturan dengan mengandalkan uang dan kekuasaan, maraknya peredaran narkotika yang melibatkan para narapidana dan penjaga lembaga pemasarakatan, dan paling mutakhir adalah tentang pemerkosaan terhadap anak di bawah umur.

⁵ Pengamatan terhadap kerusakan moral masyarakat ini dimulai sejak tahun 2011 sampai sekarang.

⁶ TEMPO, Majalah Berita Mingguan, edisi Juli 2011, 11-17 antara lain menyoroti uang M. Nazaruddin mengalir kemana-mana, pemalsuan surat Komisi Yudisial, dan terbitnya Surat Keputusan No. 255/IV/2011 yang dikeluarkan Dirjen Perhubungan Udara dan masih banyak lagi yang berkait dengan sengkarut penegakan aturan dan hukum.

⁷ Ibid.

Argumen para peneliti dan pemerhati masalah-masalah sosial kemasyarakatan sangat jelas, dengan menghadirkan bukti-bukti valid dan menunjukkan perilaku dalam bermasyarakat dan berkebangsaan yang setiap hari disuguhkan oleh para tokoh elit, menampilkan moralitas sekadarnya, berbasa-basi, klise, dan hipokret.⁸ Akibat yang ditimbulkan sangat nyata, terutama di kalangan menengah ke atas, dan masyarakat terdidik, yaitu semakin menipisnya kepercayaan terhadap pemerintah dan berdampak pula pada tingkat efektivitas program pemerintah yang dicanangkannya.⁹

Ironisme dirasakan oleh bangsa Indonesia, yang katanya berbudaya, yang menghargai adat-istiadat ketimuran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, kesantunan, dan toleransi. Sejurnya, apa yang sebenarnya kita harapkan dari bangsa sebesar Indonesia ketika perjalannya meniti peradaban, tetapi justru semakin jauh meninggalkan moralitas?

Sesungguhnya apa yang dimaksud dengan moral? WJS. Poerwodarminto, mendefinisikan moral sebagai ajaran tentang baik-buruk perbuatan dan kelakuan, term yang mirip adalah etika, yaitu ilmu pengetahuan asas-asas akhlak (moral).¹⁰ Pengertian tersebut, merujuk terminologi "baik dan buruk"nya suatu perbuatan. Menurut Kant, sebenarnya tidak ada yang disebut baik di dunia ini atau di manapun tanpa kualifikasi, kecuali kemauan baik, "*there is noting in the world or even out of it that can be called good without qualification expect a good will*".¹¹ Yang dimaksud dengan *good will* oleh Kant adalah kemauan baik yang dilandasi oleh kebijakan dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Hanya saja dalam praktiknya, *good will* dengan *leads to a good result* itu tidak selalu menjadi kenyataan,¹² hal ini tentu terkait dengan banyak variabel, termasuk karakter manusianya.¹³

⁸ Benny Susetyo, *Hancurnya Etika Politik*, (Jakarta: Kompas, 2004), 3.

⁹ Harian Kompas, Jawa Pos Metro TV dan TV One secara serentak pada tanggal 8 Juli 2011, melaporkan dan menyoroti bahwa Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudoyono kepada para menterinya, ternyata hanya kurang dari 50 persen yang dijalankan, bahkan Kompas dan Jawa Pos menampilkannya sebagai Head Line "Instruksi Presiden Tak Jalan".

¹⁰ WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), dalam kata "moral".

¹¹ W. Lillie, *An Introduction to Ethics*, (New York: Barnes & Noble, 1966), 147-148.

¹² Burhanuddin Salam, *Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Etika*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 7.

¹³ Dharma Kusuma, et al., *Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), 11-21.

Kata “moral” berasal dari bahasa Latin “*mores*”, bentuk jamak dari *mos* berarti kebiasaan. Dalam bahasa Inggris yang disebut “*moral*”, yaitu *concerned with principles of right and wrong behavior*,¹⁴ sedangkan istilah yang dekat dengan moral adalah etika yang berarti *moral principles that control or influence a person’s behaviour, a system of moral principles or rules of behaviour*.¹⁵ Dalam praksis kehidupan bermasyarakat, etika berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia.¹⁶

Islam mengenal istilah akhlak, sebagaimana pernyataan Rasulullah SAW bahwa beliau diutus Allah SWT untuk menyempurnakan akhlak. Spirit akhlak dan etika dalam konteks pernyataan Rasulullah SAW itu sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan, mengingat pada masa awal kerasulannya perilaku masyarakat Arab pada umumnya tidak berperikemanusiaan, seperti tidak menghargai derajat wanita, merendahkan antarsuku, dan bahkan menyembah berhala yang dibuat sendiri.

Akhlik atau etika dibagi ke dalam etika umum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap tindakan manusia, dan etika khusus yang membahas prinsip-prinsip tersebut dan hubungannya dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya. Dibedakan pula dengan etika individual yang berkaitan dengan kewajiban manusia sebagai individu terutama terhadap dirinya sendiri melalui suara hati terhadap Yang Maha Kuasa, dan etika sosial yang jauh lebih luas yang berkaitan dengan manusia sebagai makhluk sosial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

Secara normatif, ajaran moral keagamaan dengan ajaran moral kemanusiaan sesungguhnya sudah sangat jelas dan saling melengkapi, saling menguatkan untuk menopang eksistensi kemanusiaan dalam mengabdi sebagai bagian dari masyarakat dan sebagai hamba Tuhan. Banyak unsur atau variabel yang berpengaruh terhadap terbentuknya moral (individual dan sosial), antara lain karena proses internalisasi dalam pendidikan tidak utuh, atau karena pengambilan dimensi ilmu pengetahuan sains dan

¹⁴ A.S. Hornby, et al., *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 2000), 825-826.

¹⁵ *Ibid.*, 498.

¹⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 13.

¹⁷ *Ibid.*

teknologi sepotong-sepotong, atau kerena mengikuti kecenderungan global ke arah kehidupan positivis-pragmatis dan hedonis, maka dimensi moral (kemanusiaan dan keagamaan) di dalam ilmu pengetahuan sains dan teknologi sebagai aksiologinya, kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Terbangunnya budaya masyarakat dalam berbangsa ini di samping dipengaruhi kecenderungan budaya pragmatis-materialis dan hedonis, harus diakui bahwa budaya masyarakat Indonesia juga merupakan produk pendidikan (formal, nonformal, dan informal) dan pengajaran di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi. Situasi dan kondisi bangsa kita tersebut seharusnya menjadi *concern* para ilmuwan untuk ikut membenahi dan bahkan harus ikut bertanggung jawab atas karut marutnya moral dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keteladanan moral para pendidik (guru, orang tua, tokoh masyarakat) dalam proses pendidikan, materi pendidikan (ilmu) yang diajarkan, paradigma yang dibangun para ilmuwan menyumbang lebih besar terbentuknya konfigurasi budaya masyarakat. Dengan demikian, kondisi dan kenyataan budaya masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sekarang ini, sesungguhnya dibentuk oleh proses pendidikan masa lampau. Keteladanan bermoral para pendidik yang substansinya berupa kejujuran dan objektivitas juga merupakan produk dari hasil proses pendidikan sebelumnya, dan seterusnya sebagai mata rantai pembentukan budaya.

Dari berbagai unsur atau variabel pembentuk moral tersebut, tulisan ini lebih fokus pada sumbangan paradigma ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam membentuk budaya masyarakat yang bermoral.¹⁸ Pembentukan budaya masyarakat

¹⁸ Perdebatan mengenai sumber ilmu pengetahuan di kalangan epistemolog empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisjonisme, masing-masing akan menentukan corak dan karakter budaya dan moral masyarakat yang secara konsisten dan komitmen memercayai dan mengembangkannya. Khususnya epistemologi intuisjonisme, masih harus dibedakan antara intuisjonisme yang bersumber dari intuisi ala Bergson, Kant, atau para filsuf Muslim. Metode epistemologi intuisjonisme dalam Islam, Mukti Ali menyebutnya dengan *scientific cum doctriner*, artinya terbentuknya ilmu pengetahuan sebagai salah satu dasar kebudayaan atau moral masyarakat, bersumber dari doktrin atau ajaran yang diturunkan Allah SWT melalui wahyu-Nya, baik wahyu yang difirmankan maupun wahyu yang berupa alam dengan seluruh fenomenanya.

yang hanya mengambil salah satu dari dimensi ilmu pengetahuan,¹⁹ dan hanya bersumber dari moral kemanusiaan tentu akan menghasilkan budaya yang tidak utuh, dan mudah tergerus pola kehidupan pragmatis, materialis, dan hedonis. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa ilmu bebas nilai, adalah suatu pandangan yang hanya mengambil satu dimensi ontologi ilmu saja. Demikian juga paham yang menyatakan bahwa kebenaran agama adalah kebenaran fatamorgana atau setidaknya diposisikan sebagai hal yang subjektif.²⁰ Di sinilah letak tanggung jawab ilmuwan bersama pemangku kepentingan (*stake-holder*) dalam membentuk budaya bangsa yang bermoral.

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu produk khas manusia dan dipandang sebagai salah satu unsur dasar kebudayaan yang mampu mengantarkan peradaban global dan membawa akibat-akibat besar terhadap eksistensi kemanusiaan. Melalui potensi ilmu pengetahuan, manusia dapat membudayakan diri dan menyumbang bagi pemenuhan kodratnya sehingga menjadi pribadi yang bermartabat dan berbudaya. Prinsipnya, sebagai salah satu kekuatan dasar kebudayaan yang khas manusiawi, ilmuwan bisa memosisikan dirinya pada jalur tanggung jawab kultural untuk dapat merealisasikan diri manusia pada alam kebudayaan secara utuh dan menyeluruh.²¹

Epistemologi Ilmu dan Tanggung Jawab Ilmuwan

Lahirnya ilmu pengetahuan (*science*) menandai lahirnya peradaban modern dengan karakter positivistiknya yang serba terukur (*measurable*). Perkembangan ini kemudian diikuti dengan kecenderungan memosisikan ilmu pengetahuan secara parsial antara hakikat, proses, dan nilai guna (ontologi, epistemologi, dan aksiologi) bagi suatu ilmu yang lebih dikenal dengan pluralisasi ilmu. Perkembangan tersebut mendasari berbagai keberhasilan dan sekaligus menunjukkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Ketika

¹⁹ Dalam filsafat ilmu, terdapat tiga dimensi ilmu; ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Noeng Muhamadzir, *Filsafat Ilmu, Positivisme, Post-Positivisme, dan Post-Modernisme*, (Yogyakarta: Rake Sarasim, 2001), 57.

²⁰ Noeng Muhamadzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasim, Edisi IV, 2002), 3; Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu; Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Bandung: Arasy Mizan dan UIN Jakarta Press, 2005), 20.

²¹ Aholiab Watloly, *Tanggung Jawab Pengetahuan; Mempertimbangkan Epistemologi secara Kultural*, (Yogyakarta: Kanisius, Cet. 5, 2005), 21.

ilmu pengetahuan hanya dilihat dimensi ontologisnya, maka akan memunculkan jargon "ilmu pengetahuan bebas nilai". Ketika ilmu pengetahuan dibatasi pada entitas empirisme yang *measurable*, pada saat demikian menunjukkan keterbatasan jangkauan ilmu pengetahuan itu.

Kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan inilah yang sesungguhnya sedang melanda kemajuan peradaban positivisme yang dilahirkan oleh ilmu pengetahuan yang diklaim sebagai entitas yang mampu menyelesaikan seluruh problem manusia. Dalam rangka menyelamatkan manusia, misi dan peran seorang ilmuwan menjadi ganda, di satu sisi menempatkan ilmu pengetahuan sebagai "pencerah" sebagaimana fungsi dasarnya, dan pada sisi lain harus menyejahterakan. Dengan kata lain, ilmuwan harus melihat dan memosisikan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi sebagai satu keutuhan, memosisikan manusia sebagai manusia dan sebagai hamba serta khalifah di muka bumi. Ilmuwan harus menyatukan ilmu, amal, dan moral (tiga serangkai) dalam diri seorang ilmuwan dalam mengelola dunia.²²

Ontologi setiap ilmu pengetahuan (*science*) substansi primernya (*primary substance*) merupakan potensi (*dinamis*) dan tergantung pada sifat-sifat yang dilekatkan pada ilmu pengetahuan (*secondary substance*) itu.²³ Ilmu sebagai produk (*aksidensia*) olah akal budi, berada di dalam posisi dan fungsi tertentu,²⁴ dan para ilmuwan terlibat dalam proses menjadikan ilmu pengetahuan memiliki posisi dan fungsi tersebut dalam membentuk kebudayaan.²⁵ Karakteristik kebudayaan yang dihasilkan tidak terlepas dari

²² Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), XIII.

²³ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*, (Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-3, 1985), 46.

²⁴ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakekat Ilmu Pengetahuan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-1, 2008), 110.

²⁵ Epistemologi berasal dari bahasa Yunani "episteme" yang berarti pengetahuan dan "logos" yang berarti ilmu. Dalam bidang ini terdapat tiga persoalan pokok: a) Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari mana pengetahuan yang benar itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya? b) Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Apakah ada dunia yang benar-benar di luar pikiran kita? Kalau ada, apakah kita dapat mengetahuinya? (Ini adalah persoalan yang mengarah pada problem *phenomena* dan *noumena*). c) Apakah pengetahuan kita itu benar (*valid*)? Bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dan yang salah? (problem verifikasi). Lihat: Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Jogjakarta: Belukar, Cet. Ke-1, 2004), 22.

peran ilmuwan dalam membidani lahir dan memersepsikan eksistensi suatu ilmu pengetahuan. Memersepsikan apakah sumber ilmu pengetahuan itu terbatas yang empiris atau termasuk hal-hal yang melampaui yang empiris (*supraempiris*), jika memasukkan entitas yang kedua, apakah tersedia metode yang dapat dimanfaatkan untuk mempelajarinya?

Gambaran sejarah epistemologi menunjukkan bahwa hampir setiap periode perkembangannya selalu dipengaruhi oleh sikap petualangan dan pertentangan antara berbagai aliran. Situasi pertentangan tersebut telah melahirkan begitu banyak aliran epistemologi yang terus berkembang yang diiringi dengan sikap saling klaim dan menegaskan realitas kebenaran lainnya. Muncul pula sikap pemutlakan dan pembatasan (*determinasi*) secara sepihak yang berfokus pada klaim-klaim kebenaran sektoral, seolah-olah bahwa ilmu pengetahuan “yang benar” adalah ilmu pengetahuan yang dibelanya dan kadang telah terjebak pada ego sektoral yang praktis pragmatisme.

Egoisme dan kesombongan sektoral di antara berbagai aliran epistemologi semakin kuat berkembang dan semakin kejam menguasai serta membelenggu keutuhan diri kehidupan manusia beserta produk ilmu pengetahuannya. Padahal setiap ilmu pengetahuan memiliki objek, metode, sistem, dan paradigma yang berbeda-beda.²⁶ Ketika sumber ilmu terbatas pada yang empiris maka objek, metode, sistem, dan paradigma yang dibangun sebatas yang indrawi dan rasional saja, tetapi jika termasuk hal-hal yang *supraempiris* maka seorang ilmuwan harus membangun paradigma dan metodologi yang sesuai dengan objek ilmu itu sendiri.

Dalam parkembangan di atas, tampak bahwa ilmuwan telah memanfaatkan peran epistemologi untuk memengaruhi pendapat umum melalui filsafat sebagai induk dari segala jenis, bentuk, dan sifat ilmu pengetahuan. Para ilmuwan di Indonesia sekarang ini pada umumnya mengambil sikap pragmatis dan sektoral dan lebih memilih ilmu pengetahuan praktis, mereka tidak tertarik dengan filsafat yang fokus kajiannya berupa kebenaran pengetahuan yang bersifat umum, bobot nilai, abstrak, dan universal. Filsafat memang tidak memberikan jawaban cepat terhadap kebutuhan praktis dan instan, karena filsafat memang tidak berkepentingan atau tidak

²⁶ *Ibid.*, 117-118.

seharusnya menjawab persoalan-persoalan hidup yang berbentuk dan bersifat konkret, positif, praktis, dan pragmatis.

Ketertarikan pada sains modern yang begitu kuat dengan hukum fisinya, telah menjadikan manusia sebagai makhluk materialis yang secara biologis terikat pada dan digerakkan oleh hukum-hukum mekanik, sama seperti pada mesin atau hewan. Situasi perkembangan demikian ini akhirnya telah begitu kuat menggerogoti keutuhan manusia,²⁷ dan memporak-porandakan sendi-sendi dasar keutuhan eksistensinya yang dinamis, serta mengabaikan kodrat keagungannya. Sikap tersebut telah melahirkan apa yang disebut sebagai penyakit peradaban.

Pemilihan ilmuwan terhadap sains modern yang praktis-teknologis diiringi pula dengan membangun epistemologi,²⁸ kemudian melahirkan aliran epistemologi baru pada sains modern yang praktis-teknologis dan cenderung melepaskan aksiologi ilmu (nilai-nilai moral, religius, dan humanis). Setiap aliran epistemologi ilmu pengetahuan dibangun untuk memperkokoh bangunan ilmu (*the body of knowledge*) untuk saling berlomba atas nama kemajuan, padahal sejatinya memenggal-menggal tubuh dan kehidupan manusia menjadi bagian-bagian kecil yang saling terpisah, dengan dalih supaya mudah dianalisis berdasarkan spesifikasi ilmu. Di sisi lain, alam kehidupan yang selama ini dipahami sebagai tanda kekuasaan Allah, telah diubah serta diklaim oleh aliran-aliran epistemologi tersebut menjadi bengkel eksplorasi dan eksploitasi untuk memenuhi keinginannya.

Paradigma yang menjadi landasan epistemologi berbagai disiplin ilmu pengetahuan dengan objek studi yang berbeda-beda tersebut, terlepas dari aspek kualitatifnya (aksiologi). Mempraktikkan pluralisme ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi terlepas dari epistemologi dan aksiologi-etic ilmu berarti telah memenggal-menggal keutuhan ilmu pengetahuan padahal seharusnya diintegrasikan antara aspek kualitatif spiritual dengan kuantitatif material, sehingga teori yang dibangun untuk mengembangkan aspek praktis-teknologis pada masing-masing ilmu tidak terlepas dari nilai moral (religius dan humanis).

²⁷ Potensi manusia yang mampu menjangkau entitas supra-empiris dan transendental telah didegradasi kepada hal-hal yang bersifat empiris dengan segala konsekuensi metodologisnya.

²⁸ Noeng Muhamdajir, *Filsafat Ilmu...*, 63.

Untuk mendukung tesis tersebut, harus didudukkan kembali posisi filsafat sebagai induk ilmu yang ruang lingkup objek studinya mencakup semua hal yang ada – bahkan yang mungkin ada – sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena objek studi filsafat mempelajari tentang apa/metafisiknya, sasaran penyelidikannya mengarah kepada nilai hakiki kebenaran pengetahuan yang berkuantitas menyeluruh dan bersifat abstrak universal. Dengan derajat pengetahuan demikian, filsafat mampu mengungkap secara substansial apa yang menjadi latar belakang (metailmu) dan tujuan (aksiologi) keberadaan sesuatu.²⁹ Persoalan-persoalan konkret dan praktis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup sehari-hari, secara langsung memang tidak menjadi lingkup studi filsafat.

Filsafat mengerti apa yang seharusnya menjadi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi filsafat tidak mengetahui bagaimana cara dan teknis mengadakannya. Karena pengadaan dan teknis memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari menjadi objek studi ilmu pengetahuan khusus yang bersifat praktis dan teknologis. Akan tetapi pemanfaatan ilmu pengetahuan praktis dan teknis tidak boleh dilepaskan dari tujuan substantifnya. Tugas ilmuwan bukan sekadar menjadikan kehidupan menjadi lebih mudah, tetapi pada pundaknya terbebani tugas moral sebagai pencerah dan penyejahtera kehidupan manusia.

Dengan kecenderungan budaya masyarakat yang semakin pragmatis-materialis ini, para ilmuwan yang berkecimpung di dunia pendidikan, secara fungsional perlahan-lahan meninggalkan konsep-konsep dan teori-teori filosofis yang bersifat umum-universal. Selanjutnya, ilmu pengetahuan bergerak ke arah teknologi yang berkemampuan langsung dalam memproduksi barang-barang konsumtif dan peralatan hidup sehari-hari. Sebagai konsekuensinya, terjadilah pergeseran nilai yang terkandung dalam pandangan hidup, sikap, dan perilaku hidup masyarakat. Dari derajat yang bersifat kualitatif spiritual menjadi kuantitatif material. Pandangan semacam ini diiringi dengan membangun epistemologi, dengan menghilangkan aspek nilai etika kejujuran,

²⁹ Filsafat merupakan usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh suatu pandangan dunia (*worldview*) dan hidup yang memuaskan hati. Di sisi lain, terdapat upaya untuk memperoleh *worldview* melalui agama melalui iman. Lihat: Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah..., 8.*

etika sosial, kebijaksanaan hidup, kejiwaan, kultur, dan spiritualitas yang bersifat metafisik-transendental.

Pergeseran nilai sebagai akibat perubahan pandangan hidup, sikap, dan perilaku hidup atas pengaruh kemajuan sains dan teknologi tersebut, secara sistemik terbukti semakin menurunkan (bahkan merusak) derajat moralitas masyarakat. Penurunan atau rusaknya moral masyarakat ini, tidak bisa dialamatkan kepada substansi kemajuan sains dan teknologi itu sendiri, melainkan lebih disebabkan oleh bagaimana cara manusia (ilmuwan) menyikapi dan memberdayakan sains dan teknologi itu.³⁰ Kemajuan sains dan teknologi dalam kondisi kepadatan penduduk dunia, umpamanya, maka hal demikian bisa mengancam ketersediaan kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini, kemajuan sains dan teknologi difungsikan untuk eksploitasi dan reproduksi sumber daya alam dengan sikap monopolistik. Sikap hidup manusia demikian itu, selanjutnya mengubah pandangan hidup dan perilaku hidup menjadi “positivisme-materialistik”. Manusia memberdayakan kemajuan sains dan teknologi untuk berlomba memproduksi beraneka ragam jenis dan bentuk makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan peralatan hidup lainnya secara praktis-pragmatis.³¹

Fakta ini selanjutnya secara langsung memicu pertumbuhan dan perkembangan budaya persaingan. Perilaku bersaing secara kuat mendorong perilaku keserakahahan ekonomi liberal-kapitalistik.³² Basis perekonomian liberal-kapitalistik ini pada ujungnya menjadi penyebab utama kerusakan “moral kerja sama” dalam kultur kebersamaan sebagai dasar kehidupan sosial ke-masyarakat. Pergeseran kehidupan demikian, secara otomatis berlaku hukum rimba yang menjadi karakter kehidupan bermasyarakat. Siapa yang kuat – para pemilik sains dan teknologi – adalah yang menang. Sebaliknya mereka yang lemah – bukan

³⁰ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 237.

³¹ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan...,* 18.

³² Ciri liberalisme ekonomi terletak pada pembatasan peran negara, baik sebagai regulator maupun sebagai pelaku ekonomi. Adapun ciri ekonomi kapitalis: 1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak dan milik pribadi, dan 2) penyerahan proses ekonomi kepada mekanisme pasar bebas. Artinya, keputusan produksi, harga dan kesempatan kerja ditentukan oleh mekanisme penawaran dan penerimaan. Baca: Rizal Ramli, et al., *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: PPM FE UII, 1997), 251.

pemilik sains dan teknologi – tetap sulit untuk keluar dari kungkungan penderitaan.

Kini hampir sebagian besar manusia di dunia ini terjebak ke dalam suatu pola hidup ekonomi liberal-kapitalistik yang cenderung materialistik, yang mengakibatkan krisis moral yang parah. Sistem ekonomi kapitalis dengan orientasi materialistik itu sudah masuk ke seluruh relung-relung kehidupan masyarakat dunia, termasuk negara yang mengklaim sebagai negara yang memiliki kultur beragama dan negara maju, sehingga krisis moral menjadi sangat sulit diatasi. Akibatnya lingkungan hidup mengalami dis-harmonis dan sumber daya pendukungnya juga sedang mengalami krisis. Krisis lingkungan alam sedang mengglobal, dunia seolah terbelah menjadi dua kubu, yaitu mereka yang rakus kemewahan dan mereka yang menahan penderitaan lapar dan dahaga. Kedua belah pihak saling berlomba mengeksploitasi sumber daya alam secara bersama-sama, dua-duanya mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang semakin sulit mendapatkan jalan keluar untuk merehabilitasinya.

Fakta perilaku manusia yang bersifat eksploratif itu membuktikan kegagalan peran manusia sebagai khalifah Allah bagi kehidupan ini.³³ Karena para ilmuwan mengabaikan dimensi spiritualitas, aksiologi-bermoral yang semestinya menjadi bagian integral dari *body of knowledge* dalam setiap ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Dengan sains dan teknologi, manusia justru berperilaku tidak adil terhadap alam, diri sendiri, masyarakat, rakus, dan tamak. Keadaan inilah yang seharusnya menjadi perhatian penuh filsafat sebagai induk sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga wajarlah jika filsafat merasa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya malapetaka besar yang bisa menghancurkan kelestarian hidup manusia dan dunianya.³⁴

Dalam keadaan demikian, ilmu telah mengeksplorasi manusia dan alam. Juga terjadi disfungsionalisasi, sekularisasi, dan bahkan devاستasi terhadap lingkungan hidup manusia itu sendiri. Tidak cukup sampai di situ, sekularisme menghancurkan kesucian dan

³³ Pesan ayat-ayat al-Qur'an yang memberikan mandat kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi ini, seperti QS. al-Baqarah [2]: 30; QS. Shaad [38]: 26; QS. Yunus [10]: 14, dan masih banyak lagi.

³⁴ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan...*, 19.

³⁵ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1984), 15.

universalitas nilai-nilai moral.³⁵ Ini yang disebut al-Attas sebagai keadaan "hilangnya adab" (*loss of adab*),³⁶ yang kemudian berimplikasi pada hilangnya sikap adil dan kebingungan intelektual (*intellectual confusion*).³⁷

Kemudian, apakah yang dapat dilakukan oleh filsafat? Beberapa pertanyaan yang dapat dimajukan oleh peran dan fungsi filsafat, antara lain: Apakah yang sebenarnya dicari oleh ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi?³⁸ Jika jawabannya berupa kebenaran dan hikmah, yaitu untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yang utuh dan seimbang, tidaklah salah. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa, tujuannya bukan untuk pemenuhan kebutuhan yang demikian itu, melainkan untuk kenikmatan hidup yang material hedonistik? Jika jawaban ini yang dicari, sejauh mana kenikmatan hidup seperti itu bermakna bagi kehidupan? Bukankah kehidupan ini merupakan sebagian kecil dari keseluruhan kehidupan yang sesungguhnya?

Berhubungan dengan realitas kehidupan, Aristoteles berpendapat bahwa segala hal atau barang (yang kemudian menjadi objek studi ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi) selalu berada di dalam sepuluh kategori. Kesemuanya itu dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 1) substansi atau diri, 2) aksidensia mutlak berupa kualitas dan kuantitas, serta 3) aksidensia relatif berupa hubungan (*relation*), tindakan (*action*), derita (*passion*), ruang (*space*), waktu (*time*), keadaan (*situation*), dan kebiasaan (*habit*).³⁹

Pandangan ini menjelaskan bahwa setiap kegiatan keilmuan, akan menghasilkan tiga jenjang pengetahuan, yaitu pengetahuan filosofis-substansial, pengetahuan ilmiah-teoritis, dan pengetahuan ilmiah-praktis-teknologis. Ketiganya mempunyai tanggung jawab ilmiah berbeda-beda, mulai dari yang bertaraf filosofis, ilmiah-

³⁶ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam, Secularism and the Philosophy of the Future*, (London: Mansell, 1985), 104-105.

³⁷ Harda Armayanto, "Relevansi Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer", *Kalimah*, Vol. 7, No. 2, September 2009, (Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam, 2009), 22.

³⁸ Dalam Islam, wujud hadirnya ilmu pengetahuan bertujuan untuk memenuhi perintah Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi dan sekaligus untuk memaknukannya. Banyak ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang memerintahkan kepada kita untuk berpikir, meneliti keagungan dan rahasia Allah menciptakan alam dunia (bumi) ini, yang tujuan akhirnya untuk kesejahteraan manusia sendiri. Lihat: QS. al-'Alaq [96]: 1-5; QS. Hud [11] 60; QS. Ali 'Imran [3]: 190-200; QS. al-Nur [24]: 55.

³⁹ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan...*, 20.

teoritis, sampai pada taraf yang paling khusus-konkret. Para ilmuwan dapat memanfaatkan setiap jenjangnya untuk mengintegrasikan dimensi moral dalam kegiatan keilmuan. Dan pada saat memanfaatkan ilmu pengetahuan, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab pemanfaatan ilmu pengetahuan dan bersifat holistik (mencakup ketiga tanggung jawab ilmiah tersebut).

Aktualisasi Moral dalam Ilmu Pengetahuan

Dimensi moral dapat diintegrasikan ke dalam setiap cabang utama filsafat ilmu, baik pada ontologi, epistemologi, maupun aksiologinya. Hal demikian sangat tergantung atau keberpihakan seorang ilmuwan dalam setiap kegiatan ilmiahnya. Dalam diri manusia terdapat potensi berupa indra, akal, dan hati, yang harus dimanfaatkan secara bijak, sehingga produk peradabannya tidak timpang. Menurut 'Isa 'Abduh, harus ada keseimbangan antara *gharīzah*, *'aql*, dan *ḍamīr*.⁴⁰

Mengacu pemikiran 'Isa 'Abduh tersebut, maka banyak kalangan memandang tidak ada kesenjangan antara ilmu dan agama. Secara ontologis, Islam mengakui keberadaan dan kebenaran ayat-ayat *kauniyah* dan ayat-ayat *qa'iliyah*,⁴¹ dan sekaligus menyatukan eksistensi keberadaan atas dasar iman.⁴² Pengembangan produk pikir keagamaan, atas dasar landasan filosofis tersebut, membentuk sistem paradigma – realisme metafisik – dengan berpijak pada konsep dasar yang berpangkal pada tauhid keberadaan antara Allah SWT, keberadaan akal, dan keberadaan alam semesta.

Dengan cara pandang tersebut, berarti objek materi yang dipelajari dalam pluralitas ilmu pengetahuan, bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak. Keberadaan ilmu pengetahuan juga ditentukan oleh objek forma yang sering dipahami sebagai

⁴⁰ 'Isa 'Abduh dan Ahmad Ismail Yahya, *Haqiqat al-Insān*, (Beirut: Dār al-Fikr, T.Th), 10.

⁴¹ Arqom Kuswanjono, *Integrasi Ilmu dan Agama Perspektif Filsafat Mulla Sadra*, (Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM, 2010), 36.

⁴² Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 3-9. Sekalipun terjadi perbedaan pandangan antarilmuwan Muslim tentang realitas satuan dan hakikat keberadaan, seperti Mulla Hadi Sabzawari, Mulla Sadra, Ibnu Arabi Sadr al-Din al-Qunawi, tetapi secara substansial-universal, mereka mengakui bahwa wahyu (*kauniyah* dan *qa'iliyah*) berasal dari satu Zat Yang Maha Esa, berarti mereka dalam kesatuan tauhid atau *syahadah*. Baca: *Ibid.*, 3. Arqom Kuswanjono, *Integrasi Ilmu dan Agama...*, 91-117. Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu...*, 32-43.

sudut atau titik pandang (*point of view*) yang akan menentukan ruang lingkup studi (*scope of the study*). Berdasarkan ruang lingkup studi inilah selanjutnya ilmu pengetahuan berkembang menjadi plural, berbeda-beda, dan cenderung saling terpisah antara satu dengan yang lain.⁴³

Berdasarkan hukum kodrat (ontologis), jika mempertimbangkan proses terbentuknya dari objek forma, maka dapat dinilai bahwa pluralisme ilmu pengetahuan berada pada batas perbedaan, bukan keterpisahan. Karena, suatu objek forma merefleksikan sebagian dari keseluruhan diri objek materi, dan suatu objek materi mencerminkan keseluruhan realitas (tauhid keberadaan). Untuk kepentingan suatu kebenaran, suatu objek forma hanya merupakan satu sisi dari kebenaran menyeluruh suatu objek materi. Dengan kata lain, setiap objek forma mencerminkan ‘relativitas’ kebenaran, dan keterkaitan secara integral daripadanya, barulah merupakan kebenaran menyeluruh (universal).⁴⁴

Dengan demikian, secara ontologis, hakikat pluralitas ilmu pengetahuan menurut perbedaan objek forma itu tetap dalam satu kesatuan sistem, baik ‘interdisipliner’ maupun ‘multidisipliner’.⁴⁵ Berdasarkan kedua sistem tersebut, perbedaan antarilmu pengetahuan justru mendapatkan validitasnya, tetapi secara ontologis pemisahan atas perbedaan ilmu pengetahuan tidak dapat dibenarkan. Keterpisahan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda berkonsekuensi negatif, berupa perilaku *disorder* (perusakan) terhadap realitas kehidupan.⁴⁶

Dalam kesatuan (tauhid) keberadaan di atas, pengertian ilmu pengetahuan memerlukan rumusan yang konsisten dengan karakter kesatuan keberadaan itu. Persoalan posisi hakikat ilmu tersebut mendorong kegiatan keilmuan berikutnya, yaitu prosedur menemukan dan mengembangkan ilmu dalam agama (Islam) yang memiliki model bangunan pemikiran tersendiri. Titik sentral kerangka pemikirannya adalah Allah SWT, dan sekaligus menjadi acuan bagi keseluruhan struktur keberadaannya. Sebagai tanda kasih Allah SWT menurunkan wahyu sebagai petunjuk yang

⁴³ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan...*, 112-113.

⁴⁴ *Ibid.*, 115.

⁴⁵ Interdisipliner artinya keterkaitan antarpluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang sama, dan multidisipliner artinya keterkaitan antarpluralitas ilmu pengetahuan dalam objek materi yang berbeda.

⁴⁶ Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan...*, 115.

menerangi keseluruhan potensi kemanusiaan.⁴⁷ Melengkapi wahyu yang *qaūliyah*, Allah SWT juga menganugerahi alam dengan seluruh fenomenanya sebagai wahyu *kauniyah*, merupakan bagian untuk memperkuat kesatuan (tauhid) keberadaan tersebut.

Dengan demikian dalam epistemologi ilmu pengetahuan Islam, bisa dimulai dengan prosedur deduktif dan bisa dengan prosedur induktif, tetapi tetap dalam bingkai kebenaran dan keberadaan Tuhan yang bersifat transendental. Jika perlu menyebut aliran filsafat Barat, landasan filsafat ilmu dalam Islam lebih dekat dengan realisme metafisik.⁴⁸ Di sinilah urgensi dan pentingnya epistemologi keilmuan dalam Islam yang harus diupayakan oleh para ilmuwan dalam setiap kegiatan keilmuannya.

Ujung prosedur menemukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan adalah tujuan atau produk keilmuan itu sendiri. Koheren dengan asal usul dan prosedur dalam kerangka keilmuannya, seluruh rangkaian kegiatan intelektual Islam berujung pada satu produk sebagai tujuan akhir. Secara keseluruhan, produk ilmu pengetahuan adalah materi keberagamaan untuk mendukung kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁹ Muatan pertama dari produk tersebut adalah rumusan hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian diteruskan dengan hubungan manusia dengan manusia dan dengan alam lingkungannya. Struktur rumusan tersebut dapat berbentuk *ahkām*, *akhlāq*, *siyāsah*, *mu'āmalah*, pengetahuan keagamaan, merumuskan konsep dan teori spekulatif, empiris, teknologis, dan bahkan keterampilan hidup dan bentuk-bentuk keberagamaan yang diperlukan oleh kehidupan praktis umat manusia.

Deskripsi ontologis, epistemologis, dan aksiologis ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam tersebut memberikan kritik bahwa ada yang salah dalam memilih dan memosisikan ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam membentuk peradaban masyarakat Indonesia sekarang ini. Hal demikian, bisa dianalogikan ketika Islam mengalami zaman keemasan, saat dunia Islam mengalami kemajuan di segala bidang, terutama ilmu pengetahuan, umat Islam mampu menguasai dan membentuk budaya

⁴⁷ Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum...*, 14.

⁴⁸ Uraian lebih lengkap lihat: Karl R. Popper, *Realism and the Aim of Science*, (New Jersey: Rowman and Littlefield, 1993), 23.

⁴⁹ Muslim A. Kadir, *Dasar-Dasar Praktikum...*, 15.

masyarakat yang religius. Banyak orang-orang Barat yang datang ke dunia Islam untuk mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan. Mereka mempelajari pemikiran-pemikiran ilmiah, rasional, dan filosofis termasuk sains Islam untuk ditransfer ke daratan Eropa. Kontak antara dunia Barat dan Islam pada lima abad berikutnya, ternyata mampu mengantarkan Eropa kepada masa kebangkitan kembali (*renaissance*) dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, yang terus berkembang hingga saat ini, minus aksiologi-transendental (aspek *damîr*).

Epistemologi pengembangan ilmu pengetahuan di Barat yang minus aksiologi-transendental tersebut melahirkan paradigma rasionalisme dan empirisme,⁵⁰ yang berarti telah mendegradasikan keutuhan manusia dan budaya keilmuannya. Dengan paradigma empirisme berarti hanya mengakui arti dan sumber ilmu pengetahuan dari indra dan rasio, paradigma ini kemudian didukung paham sekularisasi.⁵¹ Kemajuan bidang ilmu pengetahuan rasionalisme-empirisme di Barat, secara tak terelakkan merembet ke dunia Islam, dan bahkan merasuki wilayah substansi ilmu-ilmu ke-Islaman. Posisi sejarah demikian seringkali tidak dimengerti oleh sebagian umat Islam, mereka kemudian menggandrungi dengan kemajuan yang dicapai oleh Barat dan ingin mentransformasikannya ke dunia Islam begitu saja. Dalam kalimat Hossein Nasr, dunia Islam saat ini telah terjadi kekacauan dan kerancuan dalam kurikulum pendidikan Islam, karena meniru secara membabi-butu

⁵⁰ Paham rasionalis hanya mengakui akal sebagai dasar ilmu pengetahuan, dan manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal (deduksi) dalam menangkap objek, fungsi indra sekadar untuk merangsang akal untuk bisa bekerja. Tokoh-tokohnya seperti Rene Descartes, Spinoza, Leibniz, dan Wolff yang memiliki akar dari Plato dan Aristoteles. Sementara itu dalam empirisme menyatakan bahwa manusia memperoleh ilmu pengetahuan melalui pengalaman baik pengalaman lahiriah maupun batiniah. Tokoh-tokohnya seperti Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Home, dan lain-lain. Dengan hanya mengakui sumber dan produk dari rasionalisme dan empirisme, berarti menegasikan intuisi yang menjadi salah satu sumber dan kebenaran ilmu pengetahuan. Seperti pendapat Henry Bergson, bahwa intuisi merupakan suatu sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Lihat: Muhammad Muslih, *Filsafat Ilmu...*, 58-84.

⁵¹ Terminologi sekuler biasanya diartikan sebagai “*not connected with spiritual or religious matters*” merupakan kata sifat dari “*the belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc*” Lihat: John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Vol. 6, (Bandung, Mizan, 2001), 128. Kata “sekularisme” berasal dari bahasa Latin *saeclum*, yang berarti “masa” atau “generasi” dalam arti waktu temporal. Kata ini kemudian menjadi bermakna pada segala hal yang berhubungan dengan dunia ini, yang dibedakan dengan hal yang spiritual yang ditujukan untuk mencapai surga. Lihat: Suparlan Suhartono, *Filsafat Ilmu Pengetahuan...*, 20.

terhadap model-model Barat yang terbaur dengan model-model yang dipertahankan dalam sistem pendidikan Islam.⁵²

Dengan demikian, kehadiran filsafat ilmu pengetahuan di tengah-tengah pluralitas ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, berfungsi sebagai ‘pencerah’ dan ‘penyejahtera’ dan menuntut suatu pengembangan secara interdisipliner atau multidisipliner, dimanfaatkan secara etis yang tidak bebas nilai. Upaya pengembangan dan pemnafaatan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang demikian itu terarah kepada dua sasaran pokok, yaitu memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan sumber daya alamnya.

Pemberdayaan seperti ini berarti bahwa setiap bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi difungsikan secara sinergis dan saling menguji menurut dasar kelayakannya. Ukuran kelayakan dimaksud adalah adanya hubungan kausal antara pemenuhan kebutuhan hidup dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Visi pemberdayaan demikian mengharuskan para ilmuwan, khususnya para praktisi pemeberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, untuk mampu dan mau bersikap ilmiah, yaitu mengakui keseluruhan potensi manusia (indra, rasio, dan intuisi) dalam petunjuk Allah SWT. Sikap ilmiah inilah yang menjadi rambu-rambu etika moral pemberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa dalam hal pemberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, peran para ilmuwan dan teknolog adalah penting dan menentukan, demi tercapainya kedua sasaran tersebut. Karena, atas kemampuan dan tanggung jawab mereka lah sebenarnya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi ditemukan, dikembangkan, dan diberdayakan. Moralitas dan perilaku etis mereka, baik keilmuan alam, sosial, agama, sungguh-sungguh berfungsi sentral dan menentukan untuk tercapainya tujuan pemberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.

Sebab itu pula, signifikansi dan urgensi kehadiran filsafat ilmu pengetahuan di tengah-tengah dinamika pluralitas ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dewasa ini membawa misi moral keadilan. Dalam rangka untuk mempertanggungjawabkan

⁵²Sayyed Hossein Nasr, “Kata Pengantar”, dalam Osman Bakar, *Hierarki Ilmu; Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*, (Bandung, Mizan, 1990), 11.

kewajiban tersebut, langkah utamanya adalah mengoordinasikan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi ke dalam satu kesatuan sistem yang utuh, menurut dasar keutuhan realitas ini. Untuk selanjutnya, filsafat ilmu pengetahuan masuk dan ikut serta ke dalam setiap kegiatan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi.

Penempatan moral di atas ilmu pengetahuan, memiliki relevansi yang tinggi dengan filsafat ilmu itu sendiri, sebab filsafat ilmu memandang suatu ilmu harus memiliki kriteria ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kriteria yang disebut terakhir jelas memandang keniscayaan ilmu bagi kesejahteraan umat manusia. Jalan pikiran ini dibangun atas keyakinan bahwa ilmu pengetahuan bertujuan mencerahkan dan menyejahterakan manusia apabila dalam aksiologinya dipertimbangkan secara serius penegakan moral. Sebaliknya, ilmu pengetahuan sains dan teknologi akan berbalik mendatangkan kesengsaraan dan malapetaka bagi manusia, manakala dalam aksiologinya minus moral, etika, dan akhlak.⁵³

Terhadap kegiatan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, bahwa filsafat ilmu pengetahuan memberikan landasan dasar, kontrol, dan bimbingan serta koordinasi menyeluruh, sehingga ilmu pengetahuan, sains dan teknologi tersusun dan terorganisasi dalam satu kesatuan sistem yang utuh. Keutuhan sistem ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dengan didukung oleh moralitas dan perilaku ilmiah, dapat menjamin pemberdayaannya secara berkeadilan sebagai jalan menuju hidup dan kehidupan yang berkesimbangan.

Penutup

Ilmu pengatahan merupakan salah satu produk khas manusia dan dipandang sebagai salah satu unsur dasar kebudayaan yang mampu mengantarkan peradaban global dan membawa akibat-akibat besar terhadap eksistensi kemanusiaan. Melalui potensi ilmu pengetahuan, manusia dapat membudayakan diri dan menyumbang bagi pemenuhan kodratnya sehingga menjadi pribadi yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya. Sebagai salah satu kekuatan dasar kebudayaan yang khas manusiawi, ilmuwan

⁵³M. Amin Rais, "Kata Pengantar", dalam Syahrin Harahap, *Penegakan Moral Akademik..., XII-XIII*.

dapat memosisikan dirinya pada jalur tanggung jawab kultural untuk dapat merealisasikan diri manusia pada alam kebudayaan secara utuh dan menyeluruh.

Ilmu pengetahuan yang tidak disertai moral baik dari para ilmuwannya berdampak buruk pada kehidupan. Perilaku manusia yang demikian itu membuktikan kegagalan peran manusia sebagai khalifah Allah bagi kehidupan ini. Para ilmuwan mengabaikan dimensi spiritualitas, aksiologi-bermoral yang semestinya menjadi bagian integral dari *body of knowledge* dalam setiap ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Dengan sains dan teknologi, manusia justru berperilaku tidak adil terhadap alam, diri sendiri, masyarakat, rakus, dan tamak.

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, filsafat ilmu pengetahuan berkepentingan untuk mendorong, memperkuat, dan menunjukkan jalan yang benar dan tepat, terutama dalam hal pemanfaatannya menurut prinsip nilai-nilai etis, epistemologis, dan ontologis. Prinsip nilai etis menekankan pada moral tanggung jawab dalam perilaku pemberdayaan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi, menurut nilai kebenaran ilmiah epistemologis dan ilmiah ontologis. Prinsip nilai epistemologis menekankan pada pendirian dan sikap ilmiah menurut dasar nilai kebenaran ilmiah ontologis. Sedangkan prinsip nilai ontologis menekankan pada pandangan universal keilmuan dalam sistem interdisipliner atau multidisipliner.]

Daftar Pustaka

- 'Abduh, Isa., Yahya, Ahmad Ismail. T.Th. *Haqīqat al-Insān*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 1985. *Islam, Secularism and the Philosophy of the Future*. London: Mansell.
- Armayanto, Harda. 2009. "Relevansi Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer", *Kalimah*, Vol. 7, No. 2, September 2009. Ponorogo: Fakultas Ushuluddin dan Himpunan Sarjana Ushuluddin Institut Studi Islam Darussalam.
- Bakar, Osman. 1990. *Hierarki Ilmu; Membangun Rangka-Pikir Islamisasi Ilmu*. Bandung, Mizan.
- Esposito, John L. 2001. *Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern*, Vol. 6. Bandung, Mizan.

- Hadiwijono, Harun. 1985. *Sari Sejarah Filsafat Barat 1*. Yogyakarta: Kanisius, Cet. Ke-3.
- Harahap, Syahrin. 2005. *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hornby, A.S. et al. 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.
- Kadir, Muslim A. 2011. *Dasar-Dasar Praktikum Keberagamaan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartanegara, Mulyadi. 2005. *Integrasi Ilmu; Sebuah Rekonstruksi Holistik*. Bandung: Arasy Mizan dan UIN Jakarta Press.
- Kusuma, Dharma., et al. 2011. *Pendidikan Karakter; Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kuswanjono, Arqom. 2010. *Integrasi Ilmu dan Agama Perspektif Filsafat Mulla Sadra*. Yogyakarta: Badan Penerbit Filsafat UGM.
- Lillie, W. 1966. *An Introduction to Ethics*. New York: Barnes & Noble.
- Muhadjir, Noeng. 2001. *Filsafat Ilmu: Positivisme, Post-Positivisme, dan Post-Modernisme*. Yogyakarta: Rake Sarasini.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasini, Edisi IV.
- Muslih, Mohammad. 2004. *Filsafat Ilmu; Kajian atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Jogjakarta: Belukar, Cet. Ke-1.
- Poerwadarminto, WJS. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Popper, Karl R. 1993. *Realism and the Aim of Science*. New Jersey: Rowman and Littlefield.
- Rahman, Fazlur. 1984. *Islam and Modernity*. Chicago & London: The University of Chicago Press.
- Ramli, Rizal. et al. 1997. *Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: PPM FE UII.
- Salam, Burhanuddin. 2000. *Etika Individual; Pola Dasar Filsafat Etika*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Suhartono, Suparlan. 2008. *Filsafat Ilmu Pengetahuan; Persoalan Eksistensi dan Hakekat Ilmu Pengetahuan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Ke-1.
- Suriasumantri, Jujun S. 1988. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susetyo, Benny. 2004. *Hancurnya Etika Politik*. Jakarta: Kompas.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Filsafat Umum; Akal dan Hati sejak Thales sampai James*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- TEMPO, Majalah Berita Mingguan. 2011. Juli.
- Watlolyl, Aholiab. 2005. *Tanggung Jawab Pengetahuan; Mempertimbangkan Epistemologi secara Kultural*. Yogyakarta: Kanisius, Cet. 5.